

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam penyusunan keputusan ekonomis (IAI, 2012).

Suatu laporan keuangan yang lengkap terdiri atas (IAI, 2012):

- a. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode,
- b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode,
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode,
- d. Laporan arus kas selama periode,
- e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelas lain,
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Setiap komponen laporan keuangan berfungsi untuk menyajikan informasi tertentu, dan dalam menggunakan informasi untuk melakukan evaluasi serta pengambilan keputusan seharusnya mengaitkan informasi yang disajikan

pada semua komponen laporan keuangan (Kartihadi dkk, 2012).

2.1.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2007) disebutkan terdapat dua asumsi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yaitu dasar akrual (*accrual basis*) dan kelangsungan usaha (*going concern*). Berikut penjelasan kedua asumsi dasar tersebut:

a. Dasar akrual (*accrual basis*)

Dasar akrual berarti suatu transaksi atau kejadian yang dibukukan dan dilaporkan pada saat terjadinya dan mempunyai dampak atas sumber daya dan/atau kewajiban suatu entitas tidak semata-mata berdasarkan saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas atau setara kas. Laporan keuangan yang disusun secara akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang menimbulkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi termasuk juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan (Kartikahadi dkk, 2012)

b. Kelangsungan usaha (*going concern*)

Laporan keuangan asumsi kelangsungan usaha, entitas diasumsikan tidak akan dilikuidasi atau dikurangi secara signifikan skala usahanya. Atas dasar asumsi kelangsungan usaha, maka dalam keadaan normal suatu aset tetap lazimnya dilaporkan

di laporan posisi keuangan (neraca) berdasarkan nilai buku, namun dalam rangka pengembangan SAK menuju IFRS, mulai digunakan nilai wajar (*fair value*) untuk aset tertentu dalam keadaan tertentu. Asumsi kelangsungan usaha penting mendasari penyajian wajar suatu laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna informasi tersaji. Bila entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka perlu diungkapkan fakta tersebut bersama dasar lain yang digunakan (Kartikahadi dkk, 2012).

2.1.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Ada empat karakteristik kualitatif utama laporan keuangan yaitu (IAI, 2012):

a. Dapat dipahami (*understandability*)

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.

b. Relevan (*relevance*)

Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan,

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna dimasa lalu.

c. Keandalan (*reliability*)

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaanya sebagai penyajian yang tulus/jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan.

d. Dapat diperbandingkan (*comparability*)

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode, untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Selain itu pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.2 Sejarah Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) selalu tanggap terhadap adanya perubahan terkait standar akuntansi guna pengembangan standar yang lebih baik lagi. Hingga saat ini perkembangan standar akuntansi di Indonesia dibagi kedalam lima periode penting.

Periode pertama adalah masa Pra-PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia) sebelum tahun 1973. Sebelum tahun 1973, Indonesia tidak mempunyai standar akuntansi keuangan yang baku dan terkodifikasi. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 dan Undang-Undang

Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968, penggunaan laporan keuangan diluar pihak manajemen jarang terjadi, kecuali untuk pelaporan fiskal. Dengan berlakunya kedua peraturan perundangan tentang penanaman modal tersebut mulai timbul kebutuhan laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dimengerti, serta dapat diperbandingkan. Kebutuhan tersebut berhubungan dengan permohonan kredit investasi dari bank pemerintah dan ventura bersama dengan investor asing.

Selanjutnya masa lahirnya PAI yaitu tahun 1973-1984 dalam rangka diaktifkannya pasar modal. Atas bantuan Badan Persiapan Pasar Uang dan Pasar Modal (BAPEPUM) dibentuk Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur daripada *Generally Accepted Accounting Principles* dan *Generally Accepted Accounting Standards*. Sebagai hasil dari panitia tersebut maka lahirlah Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA). Kedua produk tersebut disahkan pada Kongres III IAI pada 2 Desember 1973 dan untuk pertama kali dibentuk Komite PAI dan komite NPA untuk mengembangkan PAI maupun NPA.

Pada tahun 1984-1994 merupakan masa penerapan PAI. Pada tahun 1984, PAI melakukan revisi mendasar PAI 1973 dan menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Sejak tahun 1986, Komite PAI secara aktif melakukan revisi atas PAI 1984 dengan menerbitkan tujuh Pernyataan PAI dan sembilan Interpretasi PAI.

Adanya fenomena penting dalam perekonomian dan bisnis nasional maupun global seperti perkembangan pasar modal yang sangat pesat, disahkannya Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Dana Pensiun, reformasi peraturan perundangan perpajakan Indonesia, timbulnya kasus bank krisis dan isu kredit macet, serta ditandatanganinya perjanjian baru GATT maka IAI menanggapi dengan segera dikembangkannya PAI dengan *International Accounting Standard*. Sejalan dengan hal tersebut, nama PAI kemudian diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada Desember 1994. Saat itu, profesi akuntan Indonesia sudah memiliki Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dan 35 PSAK yang setaraf standar akuntansi internasional.

Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan delapan kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007 dan 1 Juli 2009. Revisi terakhir dilakukan 1 Juni 2012.

2.3 Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan untuk Instrumen Keuangan di Indonesia

Sebelum mengadopsi *International Accounting Standards* (IAS) 32 dan 39 (2009) dan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 7 (2009), PSAK terkait instrumen keuangan yaitu PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) mengacu pada SFAS 115 tentang *Accounting for Certain Investment in Debt and Equity*

Securities dan SFAS 133 tentang *Accounting for Derivative Instrument and Hedging Activities*. PSAK 50 (1998) tentang Akuntansi Investasi Efek Tertentu dan PSAK 55 (1999) tentang Akuntansi Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai mulai berlaku efektif 1 Januari 1999.

Pada tahun 2006, IAI menerbitkan PSAK 50 (revisi 2006) tentang penyajian dan pengungkapan dan PSAK 55 (revisi 2006) tentang pengakuan dan pengukuran sebagai bentuk tanggapan atas perubahan tentang instrumen keuangan sehubungan dengan diterbitkannya IAS (2005): *Financial Instrument: Disclosure and Presentation* dan IAS 39 (2005): *Financial Instrument: Recognition and Measurement*. PSAK 50 dan 55 (2006) ini berlaku efektif per 1 Januari 2010.

Sehubungan dengan adanya perkembangan instrumen keuangan, maka IAI menerbitkan PSAK 50 (revisi 2010) tentang penyajian untuk menggantikan PSAK 50 (revisi 2006) dan menerbitkan PSAK 60 (2010) yang membahas tentang pengungkapan. PSAK 50 (2010) merupakan adopsi dari IAS 32 (2009), sedangkan PSAK 60 (2010) merupakan adopsi dari IFRS 7 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2012. Kemudian pada tahun 2011, dalam rangka penyempurnaan adopsi IAS 39 (2009) maka IAI menerbitkan PSAK 55 (revisi 2011) untuk menggantikan PSAK 55 (revisi 2006) dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012.

Pada tahun 2014, IAI kembali melakukan revisi terhadap PSAK instrumen keuangan sehubungan dengan dikeluarkannya IAS 32 dan IAS 39 (2013) dan IFRS 7 (2013). IAI menerbitkan PSAK 50 (revisi 2014) menggantikan PSAK 50 (revisi 2010), PSAK 55 (revisi 2014) menggantikan PSAK 55 (revisi 2011), dan

PSAK 60 (revisi 2014) untuk menggantikan PSAK 60 (2010). Ketiga PSAK ini berlaku efektif pada 1 Januari 2015. Tahun berlaku efektif 1 Januari 2015 belum dapat dijadikan penelitian yang cukup akurat karena sampai saat penelitian ini dilakukan, entitas belum mengeluarkan laporan keuangan tahunan (*audited*) 2015.

2.4 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan salah satu indikator dari tingkat kualitas laba yang dimiliki suatu perusahaan. Manajemen laba termasuk dalam *creative accounting* yang menurut Sulistiawan (2003) merupakan suatu aktivitas badan usaha untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, hasil yang diinginkan oleh penyusun laporan keuangan atau pengelola perusahaan dapat berupa penyajian nilai laba atau aset yang lebih tinggi atau lebih rendah, bergantung pada motivasi mereka melakukannya.

Praktek manajemen laba merupakan upaya pihak manajemen dalam memanipulasi laba yang ada sehingga laba menjadi rendah kualitasnya dan dapat menyesatkan *stakeholders* yang memiliki kebutuhan dengan informasi laporan keuangan. Menurut Scott (2009) alasan apapun yang dapat digunakan manajer dalam memilih suatu kebijakan akuntansi dari sekumpulan akuntansi agar dapat meraih tujuannya disebut manajemen laba. Manajemen laba yang semakin besar mengindikasikan kualitas laba yang semakin rendah, dan sebaliknya.

Manajemen laba dapat menyebabkan beberapa dampak bagi pengguna laporan keuangan eksternal maupun internal. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi investor, manajemen laba dapat merugikan investor dalam pengambilan keputusan investasi yang salah disebabkan oleh pengungkapan informasi mengenai penghasilan bersih atau laba menjadi menyesatkan.
- 2) Bagi manajer sendiri, manajemen laba dapat mengakibatkan adanya kerugian perusahaan dimasa mendatang seperti kesulitan keuangan dikarenakan tindakan manajemen laba cenderung hanya untuk jangka pendek.
- 3) Bagi regulator, mengingat bahwa fungsi standar akuntansi secara garis besar adalah melaporkan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan kepada pemangku kepentingan (Kartikahadi, 2010), maka manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat mengurangi keandalan dari laporan keuangan perusahaan.

Manajemen laba dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan beberapa kelonggaran yang diperbolehkan dalam standar akuntansi keuangan. Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Naim (2000) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Manajemen dapat mempengaruhi laba melalui perkiraan terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

- b) Mengubah metode akuntansi

Manajemen laba dapat dilakukan dengan mengubah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Contoh mengubah depresiasi aset tetap dari metode jumlah angka tahun ke metode garis lurus.

c) Menggeser periode biaya atau pendapatan

Manajemen laba dapat dilakukan dengan menggeser periode atau pendapatan. Contohnya dengan mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian sampai pada periode akuntansi periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur penjualan aset tetap perusahaan.

Berikut beberapa teori yang mendasari terjadinya praktik manajemen laba dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dapat menyebabkan perbedaan kualitas laba.

2.4.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan keterkaitan antara prinsipal (pemilik) dengan agen (manajemen) atau yang disebut dengan hubungan keagenan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Handoyo (2011) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) untuk meminta orang lain (agen) melakukan pekerjaan sesuai dengan kepentingan prinsipal, yang termasuk didalamnya pendelegasian kewenangan pembuatan keputusan kepada agen (Belkaoui, 2001).

Teori keagenan menganut asumsi yang menyatakan bahwa pemilik dan manajemen memiliki kepentingannya masing-masing (*self-interest behaviour*), serta pemilik manajemen adalah rasional, sehingga mereka akan berusaha mencapai kepentingannya masing-masing. Berdasarkan asumsi tersebut menurut Belkaoui (2001) , maka kepentingan prinsipal dan agen dapat saling bertentangan, sehingga akan memicu terjadinya konflik yang disebut dengan *agency conflict*. Disatu sisi agen berusaha untuk memaksimumkan *fee* kontraktual yang diterimanya, tergantung pada tingkat upaya yang diperlukan, di sisi lain prinsipal berusaha untuk memaksimumkan *returns* dari penggunaan sumber daya, tergantung pada *fee* yang dibayarkan kepada agen.

Adanya konflik keagenan dapat mengakibatkan adanya sifat manajemen untuk melaporkan laba secara oportunistik demi memaksimumkan kepentingan pribadinya (manajemen laba). Jika hal ini terjadi maka dapat mengakibatkan rendahnya kualitas laba (Rahmawati, 2007). Manajemen laba juga dapat terjadi karena adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Sebagaimana dikemukakan Ujiyantho (2006) dalam Handoyo (2011), asimetri informasi merupakan kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*preparer*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* sebagai pengguna informasi (*user*).

Ketidakseimbangan informasi (*asimetry information*) tersebut, dapat memberikan kesempatan pada manajemen untuk bertindak secara oportunistis, yaitu dengan menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal dan mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan, melalui praktik manajemen laba. Informasi yang lebih banyak dimiliki manajemen, dapat memicu manajemen untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingannya masing-masing, demi memaksimalkan utilitas mereka. Apabila hal ini dilakukan, maka akan berpengaruh terhadap kualitas laba yang dihasilkan dalam laporan keuangan (Handoyo, 2011).

2.4.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dimulai ketika Jensen (1976) meminta perkembangan sebuah teori akuntansi yang akan menjelaskan mengapa akuntansi menjadi seperti ini, mengapa akuntan melakukan yang mereka lakukan, dan apa pengaruh fenomena ini terhadap orang dan penggunaan sumber daya (Belkaoui, 2001). Teori akuntansi positif kemudian berkembang sebagai kritik atas teori normatif yang berdasarkan pada premis bahwa manajer akan memaksimalkan laba demi kepentingan perusahaan. Teori akuntansi positif berdasarkan teorinya pada premis bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator/politisi adalah rasional dan mereka akan berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka, yang secara langsung terkait dengan

kompensasi mereka serta terkait dengan kemakmuran mereka (Belkaoui, 2001).

Teori akuntansi positif dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksikan konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi tersebut didasarkan pada proses kontrak (*contracting process*) atau hubungan keagenan (*agency relationship*) antara manajer dengan kelompok lain, seperti investor, kreditor, auditor, pengelola pasar modal, dan institusi pemerintah. Teori akuntansi positif menggunakan asumsi berikut (Chariri, 2005) :

- Manajer, investor, kreditor, dan individu lain bersikap rasional dan berusaha memaksimalkan kepuasan.
- Manajer memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang memaksimalkan kepuasan mereka atau mengubah kebijakan produksi, investasi, dan pendanaan perusahaan untuk memaksimalkan kepuasan mereka
- Manajer, mengambil tindakan yang memaksimalkan nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan dan asumsi diatas dapat dikatakan bahwa teori akuntansi positif mencoba untuk “mencari tahu” alasan pemilihan standar/pemilihan kebijakan yang dibuat oleh manajemen, melalui analisis biaya dan manfaat dari setiap ungkapan keuangan (*financial*

disclosures). Hal tersebut dilakukan karena teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manajemen memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi dan manajemen akan berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka masing-masing. Sehingga ada kemungkinan manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba dalam proses penyusunan laporan keuangan, yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan.

2.5 Kualitas Laba

Kualitas laba merupakan sesuatu yang penting dalam dunia akuntansi karena berdasar kualitas laba tersebut investor, kreditur dan para pemangku kepentingan lainnya mengambil keputusan salah satunya berdasar pada laporan keuangan, apabila kualitas laba yang disajikan tidak dapat diandalkan maka dapat mengakibatkan para pemangku kepentingan tidak percaya pada profesi akuntansi. Sejauh ini tidak ada ukuran yang pasti tentang seberapa besar kualitas laba perusahaan dapat diukur, yang ada hanya pendekatan yang digunakan untuk memproksi kualitas laba tersebut (Surifah, 2010).

Suatu laba yang baik dalam laporan keuangan tentunya harus memenuhi tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan IAI, disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Para pemakai laporan keuangan ini yang meliputi investor atau calon investor, kreditur atau calon kreditur, rekanan,

pelanggan, karyawan, badan pemerintah, dan publik memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu laporan keuangan harus memiliki informasi yang bersifat umum dan diusahakan netral, obyektif, transparan dengan tidak memihak kepada salah satu pihak saja (Kartikahadi dkk, 2012). Pentingnya informasi laba telah disebutkan dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SAFC) Nomor 1 yang menyatakan bahwa selain untuk menilai kinerja manajemen, laba juga membantu mengestimasi kemampuan laba yang *representative*, dan akan digunakan oleh investor, investor potensial, kreditur, dan pemakai lainnya serta untuk menaksir risiko dalam investasi atau kredit.

Kualitas laba dapat didasarkan pada karakteristik kualitatif kerangka konseptual *Financial Accounting Standards Boards* (FASB) yang terdiri dari dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), materialitas (*materiality*), keandalan (*reliability*), penyajian jujur (*faithful representation*), substansi mengungguli bentuk (*substance over form*), netralitas (*neutrality*), kelengkapan (*completeness*) pertimbangan sehat (*prudence*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*). Pengukuran masing-masing kriteria kualitas tersebut secara terpisah adalah sulit dilakukan. Oleh karena itu, sebagai ukuran kualitas laba biasanya diinterpretasikan berdasarkan karakteristik relevansi dan reliabilitas.

Dalam pengambilan keputusan ekonomi secara bijak, maka *stakeholders* harus mampu menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen serta menilai kualitas informasi keuangan suatu perusahaan. Kualitas laba merupakan indikator dari kualitas informasi keuangan yang berasal dari kualitas pelaporan keuangan. Menurut Bellovary dkk (2005) dalam Surifah

(2010), kualitas laba didefinisikan sebagai kemampuan laba dalam merefleksikan kebenaran laba perusahaan dan membantu memprediksi laba mendatang, dengan mempertimbangkan stabilitas dan persistensi laba. Menurut Grahita (2001) dalam Leisa (2007), laba akuntansi yang berkualitas yaitu jika laba tersebut mempunyai sedikit gangguan (*perceived noise*) didalamnya, dan dapat mencerminkan kondisi kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur kualitas laba. Menurut Abdelhgany (2005) dalam Saputra (2013), kualitas laba terkait dengan manajemen laba dapat dibagi menjadi tiga pendekatan yang pertama berdasarkan variabilitas laba dengan asumsi bahwa manajer cenderung meratakan laba dengan harapan bahwa investor lebih memilih laba yang meningkat secara halus. Pendekatan kedua berasal dari Barton dan Simko (2002) dalam Saputra (2013), kualitas laba berfokus pada gagasan *earnings surprise* yang digerakkan oleh saldo awal aset operasi rata-rata terhadap penjualan. Sedangkan pendekatan ketiga yang diusulkan oleh Penman (2001) dalam Saputra (2013) berfokus pada rasio kas dari operasi terhadap laba. Pengukuran ini mengukur kualitas laba berdasarkan gagasan bahwa kedekatannya laba terhadap kas berarti kualitas laba yang semakin tinggi. Pendekatan ini merupakan teknik paling mudah untuk mengukur kualitas laba.

Pendekatan lain yaitu model Beaver dan Engel (1996) merupakan model pengukuran kualitas laba yang paling baik untuk industri perbankan karena model ini mampu memproksikan kualitas laba dengan nilai *discretionary accruals*. Model dari Beaver dan Engel (1996) ini memproksikan kualitas laba dari

besarnya tingkat *discretionary accruals* dimana semakin tinggi nilai *discretionary accruals* maka semakin besar indikasi adanya praktik manajemen laba yang terdapat dalam laporan keuangan dan sebaliknya.

2.6 International Financial Reporting Standards (IFRS)

Sehubungan dengan adanya kegiatan pasar modal lintas negara berkembang pesat, maka diperlukan adanya suatu standar akuntansi global yang berlaku di pasar modal seluruh dunia agar memudahkan *dual listing* dan pasar modal lebih efisien maka *International Accounting Standards Comitee* (IASC) mengeluarkan *International Accounting Standards* (IAS). IAS diharapkan dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan laporan keuangan yang berskala global. Kemudian pada tahun 2000 atas tuntutan anggotanya, IASC telah berubah menjadi *International Accounting Standards Board* (IASB) dan standar yang dihasilkan juga telah berubah menjadi *International Financial Accounting Standards* (IFRS).

Pada 23 Desember 2008, Indonesia telah menyatakan untuk melakukan konvergensi terhadap *International Financial Accounting Standards* (IFRS) dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Konvergensi IFRS merupakan salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum. Sasaran program konvergensi tersebut yaitu merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS.

Adapun dampak dari konvergensi IFRS ini menurut Sinaga (2012) yaitu menyebabkan SAK mengalami beberapa perubahan seperti menjadi bersifat

principle based, banyak menggunakan *fair value*, memerlukan *profesional judgement*, dan pengungkapan yang lebih banyak.

2.6.1 Dampak Konvergensi IFRS Terhadap Kualitas Laba

Tujuan dari adanya standar akuntansi keuangan internasional adalah untuk menyederhanakan berbagai alternatif kebijakan akuntansi yang diijinkan dan diharapkan dapat membatasi manajemen untuk memanipulasi laba sehingga dapat meningkatkan kualitas laba. Hal ini terkait dengan semakin terbatasnya pilihan-pilihan dalam metode akuntansi yang dapat diterapkan dalam pelaporan keuangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik kecurangan akuntansi berupa manajemen laba, yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan.

Menurut Chen (2009) dalam Saputra (2013) dalam penelitiannya mengenai perbedaan kualitas laporan keuangan sebelum dan sesudah adopsi IFRS, disebutkan bahwa standar akuntansi IFRS dapat mengurangi pilihan kebijakan akuntansi (*accounting alternatives*), membatasi kesempatan manajemen melakukan diskresi (*management's opportunistic discretion*), dan membutuhkan pengukuran akuntansi serta pengungkapan yang lebih. Sehingga melalui IFRS akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

Sebelum penerapan IFRS kedalam standar akuntansi, manajemen mempunyai fleksibilitas dalam memilih metode akuntansi sehingga

memotivasi manajer untuk memilih metode akuntansi atau mengubah kebijakan akuntansi yang digunakan untuk meningkatkan, menurunkan, atau meratakan laba. Fleksibilitas ini dapat meningkatkan terjadinya manajemen laba. Dengan adanya IFRS yang berarti semakin terbatasnya kebijakan akuntansi maupun metode akuntansi yang diperbolehkan dalam pelaporan keuangan akan menurunkan tingkat manajemen laba. Pengungkapan yang lebih banyak pasca penerapan IFRS juga dapat meminimalisir adanya asimetri informasi antara manajemen dengan para stakeholder yang dapat mengakibatkan manajemen laba menjadi lebih kecil dan kualitas laba meningkat.

2.7 Perbedaan PSAK 50, 55 dan 60 Sebelum dan Sesudah Adopsi IAS/IFRS

Adanya revisi dalam rangka konvergensi IFRS kedalam PSAK yang dilakukan oleh DSAK-IAI mengakibatkan adanya beberapa perbedaan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan khususnya dalam PSAK instrumen keuangan.

Penjabaran dari perbedaan PSAK 50, 55, dan 60 sebelum dan sesudah adopsi IAS/IFRS dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.7.1

Perbedaan PSAK 50 (Revisi 2006) dengan PSAK 50 (Revisi 2010)

Keterangan	PSAK 50 (Revisi 2006)	PSAK 50 (Revisi 2010)
Ruang lingkup	Kontrak untuk imbalan kontijensi dalam kombinasi bisnis tidak termasuk dalam ruang lingkup	Kontrak untuk imbalan kontijensi dalam kombinasi bisnis termasuk dalam ruang lingkup
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat definisi <i>Puttable instrument</i> <i>Puttable instruments</i> dan kontrak untuk menyerahkan bagian pro rata aset neto saat likuidasi tidak termasuk dalam instrumen keuangan entitas <i>Puttable instruments</i>, dan kontrak untuk menyerahkan bagian pro rata aset neto saat likuidasi belum menjadi bagian di dalam kontrak tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat definisi <i>Puttable instrument</i> Definisi aset keuangan termasuk suatu kontrak derivatif yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas (tidak termasuk kontrak untuk menyerahkan instrumen ekuitas di masa depan, <i>puttable instruments</i>, dan kontrak untuk menyerahkan bagian pro rata aset neto saat likuidasi). Definisi liabilitas keuangan termasuk suatu kontrak derivatif yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas (termasuk rights, opsi, dan waran pro-rata untuk semua pemilik, tetapi tidak termasuk kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas entitas di masa depan, <i>puttable instruments</i>, dan kontrak untuk menyerahkan bagian pro rata aset neto saat likuidasi).
Instrumen keuangan	Tidak termasuk kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas entitas di masa depan.	<p>Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan aset keuangan, atau mempertukarkan

Keterangan	PSAK 50 (Revisi 2006)	PSAK 50 (Revisi 2010)
		<p>aset keuangan atau liabilitas keuangan yang berpotensi tidak menguntungkan; dan</p> <p>b. Jika diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas, instrumen keuangan tersebut merupakan nonderivatif dengan kewajiban untuk menyerahkan instrumen ekuitas dengan jumlah bervariasi, atau derivatif yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas (termasuk termasuk rights, opsi, dan waran pro rata kepada semua pemilik, tetapi tidak termasuk kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas entitas di masa depan, <i>puttable instruments</i>, dan kontrak untuk menyerahkan bagian pro rata aset netto saat likuidasi).</p>
<i>Puttable instrument</i>	Tidak diatur	<i>Puttable instruments</i> diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memenuhi syarat tertentu
Kewajiban menyerahkan bagian aset netto secara pro rata saat likuidasi	Tidak diatur	Instrumen dengan kewajiban menyerahkan bagian aset netto secara pro rata saat likuidasi diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memenuhi syarat tertentu
Reklasifikasi dari liabilitas keuangan ke instrumen ekuitas	Tidak diatur	Dalam PSAK 50 (revisi 2010) diatur tentang <i>Puttable instruments</i> dan instrumen dengan kewajiban menyerahkan bagian aset netto secara pro rata saat likuidasi direklasifikasi dari liabilitas keuangan ke instrumen ekuitas ketika semua syarat terpenuhi, dan sebaliknya

Tabel 2.7.2

Perbedaan PSAK 55 (Revisi 2006) dengan PSAK 55 (Revisi 2011)

Keterangan	PSAK 55 (Revisi 2006)	PSAK 55 (Revisi 2011)
Ruang Lingkup	Tidak dibahas mengenai pengecualian <i>puttable instruments</i> .	Terdapat pengecualian untuk <i>puttable instrument</i> dan instrumen yang membayar bagian pro rata aset netto ketika likuidasi.
Definisi	Tidak terdapat definisi yang membahas tentang kontrak penjamin keuangan	Terdapat definisi yang membahas tentang kontrak penjamin keuangan
Reklasifikasi	Entitas tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari: a. kelompok 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi' ke kelompok 'tersedia untuk dijual' atau sebaliknya b. kelompok 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi' ke kelompok 'dimiliki hingga jatuh tempo' atau sebaliknya c. kelompok 'pinjaman yang diberikan dan piutang' ke kelompok 'dimiliki hingga jatuh tempo' atau 'tersedia untuk dijual'	Ada dua tambahan reklasifikasi: a. reklasifikasi dari kelompok 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi' ke kelompok 'pinjaman yang diberikan dan piutang' b. reklasifikasi dari kelompok 'tersedia untuk dijual' ke kelompok 'pinjaman yang diberikan dan piutang'

Tabel 2.7.3

Perbedaan PSAK 50 (Revisi 2006) dengan PSAK 60 (2010)

Keterangan	PSAK 50 (Revisi 2006)	PSAK 60 (2010)
Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak untuk pertimbangan kontinjensi dalam penggabungan usaha bukan merupakan ruang lingkup PSAK 50 (revisi 2006) • Tidak diatur ruang lingkup untuk instrument keuangan yang diakui seperti aset keuangan dan liabilitas keuangan serta instrumen keuangan yang tidak diakui seperti komitmen perjanjian 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencakup kontrak untuk pertimbangan kontinjensi dalam penggabungan usaha • Ruang lingkup pada PSAK 60 berlaku untuk instrument keuangan yang diakui seperti aset keuangan dan liabilitas keuangan serta instrumen keuangan yang tidak diakui seperti komitmen perjanjian
Signifikansi instrument keuangan untuk posisi dan kinerja keuangan.	Tidak terdapat pembahasan mengenai persyaratan tersebut	Mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan
Laporan Posisi Keuangan kategori asset dan liabilitas keuangan	Tidak terdapat pembahasan mengenai persyaratan tersebut	Mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan nilai tercatat untuk setiap kategori instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan
Aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan keuangan.	Tidak terdapat persyaratan tersebut	<p>Mengatur hal-hal yang perlu diungkapkan jika entitas menetapkan suatu instrumen keuangan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pinjaman yang diberikan dan piutang untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. b. liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan keuangan

Keterangan	PSAK 50 (Revisi 2006)	PSAK 60 (2010)
Reklasifikasi	Hanya mensyaratkan untuk mengungkapkan alasan reklasifikasi.	Mensyaratkan entitas mengungkapkan jumlah reklasifikasi ke dan dari setiap kategori dan alasan reklasifikasi
Penyisihan Kerugian Kredit	Tidak terdapat persyaratan tersebut	Mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan rekonsiliasi perubahan pos penurunan nilai selama periode berjalan untuk setiap kelompok aset keuangan
Laporan Laba rugi komperhensif pos-pos penghasil, beban, keuntungan atau kerugian	Tidak terdapat peraturan yang mengatur tentang persyaratan tersebut	Mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan pos pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan
Pengungkapan lainnya kebijakan akuntansi.	Tidak terdapat persyaratan yang mengatur hal tersebut	Terdapat penjelasan mengenai pengungkapan kebijakan akuntansi dan dasar pengukuran sesuai dengan PSAK 1 (Revisi 2009) : <i>Penyajian laporan Keuangan</i> paragraph 72
Nilai Wajar	Tidak diatur	Sehubungan dengan nilai wajar, hal-hal yang perlu diungkapkan adalah sebagai berikut: a. Mengungkapkan tiga level hirarki nilai wajar. b. Jika ada perbedaan nilai wajar saat pengakuan awal dengan jumlah yang ditentukan menggunakan teknik penilaian pada tanggal itu, maka mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan akuntansi untuk pengakuan perbedaan • Agregat perbedaan yang diakui dan rekonsiliasi perubahan saldo perbedaan
Jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrument keuangan	Tidak terdapat persyaratan mengenai hal ini	Mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi untuk mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan

Keterangan	PSAK 50 (Revisi 2006)	PSAK 60 (2010)
Pengungkapan Kualitatif	Tidak diungkapkan	Hal yang diungkapkan adalah: a. eksposur risiko dan bagaimana risiko timbul b. tujuan, kebijakan, proses pengelolaan risiko dan metode untuk mengukur risiko c. setiap perubahan (1) dan (2) dari periode sebelumnya
Pengungkapan Kualitatif Risiko Kredit	Hanya mengungkapkan informasi eksposur risiko kredit, termasuk jumlah paling mewakili nilai maksimal eksposur risiko kredit	Untuk setiap kelompok instrumen keuangan harus mengungkapkan: a. jumlah paling mewakili nilai maksimal eksposur risiko kredit b. uraian agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan peningkatan perikatan kredit c. informasi kualitas kredit aset keuangan yang lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai d. jumlah tercatat aset keuangan telah jatuh tempo atau penurunan nilai setelah negosiasi
Pengungkapan Kuantitatif Risiko kredit – Aset keuangan yang melewati jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai	Tidak terdapat penjelasan mengenai Pengungkapan Kuantitatif Risiko kredit – Aset keuangan yang melewati jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai.	Untuk setiap kelompok instrumen keuangan harus mengungkapkan: a. analisa umur aset keuangan yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai b. analisa dan faktor penurunan nilai c. jumlah (1) dan (2), uraian agunan dan peningkatan perikatan kredit.
Pengungkapan Kuantitatif Risiko kredit Agunan dan peningkatan	Tidak ada persyaratan yang membahas tentang Pengungkapan Kuantitatif Risiko kredit Agunan dan peningkatan kualitas kredit lainnya yang diperoleh	Ketika memperoleh aset melalui pengambilalihan kepemilikan agunan yang dimiliki sebagai jaminan, mengungkapkan: a. jenis dan jumlah tercatat aset yang diperoleh

Keterangan	PSAK 50 (Revisi 2006)	PSAK 60 (2010)
kualitas kredit lainnya yang diperoleh.		b. kebijakan pelepasan aset ketika aset tidak siap dikonversi.
Pengungkapan Kuantitatif - Risiko Likuiditas	Tidak diatur	Suatu entitas harus mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> a. analisa jatuh tempo untuk non-derivatif liabilitas keuangan b. analisa jatuh tempo untuk derivatif liabilitas keuangan c. uraian pengelolaan risiko likuiditas melekat pada (a) dan (b)
Pengungkapan Kuantitatif - Risiko Pasar - Analisa Sensitivitas	Tidak diungkapkan	Mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> a. analisa sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar b. asumsi dan metode yang digunakan dalam analisa sensitivitas c. perubahan asumsi dan metode analisa sensitivitas
Pengungkapan Kuantitatif - Risiko Pasar Lainnya	Tidak diatur	Mensyaratkan pengungkapan fakta dan alasan jika entitas tidak dapat merepresentasikan analisa sensitivitas

Dari penjabaran perbedaan yang telah disebutkan diatas, berikut adalah beberapa perbedaan yang dapat mempengaruhi kualitas laba dalam laporan keuangan. Perbedaan berikut diharapkan dapat meminimalisir atau mengurangi “celah” bagi manajer dalam melakukan manajemen laba sehingga diharapkan dapat menghasilkan perbedaan kualitas laba.

Pertama, pada PSAK 50 (Revisi 2010) yang merupakan penyempurnaan dari PSAK 50 (Revisi 2006) menambahkan satu ruang lingkup yaitu kontrak untuk imbalan kontijensi dalam kombinasi bisnis, bertambahnya definisi *puttable instrumen* dan klasifikasi instrumen keuangan, reklasifikasi dari liabilitas keuangan ke instrumen ekuitas, serta adanya aturan mengenai kewajiban menyerahkan bagian aset neto secara pro rata saat likuidasi. Bertambahnya aturan yang lebih jelas dan rinci diharapkan mampu mengurangi “celah” bagi manajer untuk melakukan manajemen laba.

Selanjutnya, perbedaan yang terdapat pada PSAK 55 (Revisi 2011) dengan PSAK 55 (Revisi 2006) yaitu mengenai aturan reklasifikasi. Setelah mengadopsi IAS 39 (2009), PSAK 55 (2011) memperkenalkan entitas untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang (L&R), dan dari kelompok tersedia untuk dijual (AFS) ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang (L&R). Pada saat reklasifikasi dari kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, maka laba (rugi) yang muncul diakui dalam laporan laba rugi. Sedangkan saat reklasifikasi dari kelompok tersedia untuk dijual ke

kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, laba (rugi) yang muncul diakui sebagai ekuitas. Bertambahnya aturan reklasifikasi diharapkan dapat membatasi manajer dalam melakukan manajemen laba sehingga akan menghasilkan perbedaan kualitas laba.

Perbedaan berikutnya yaitu mengenai pengungkapan pada PSAK 60 setelah adopsi dari IFRS 7 menjadi lebih banyak dilakukan dibandingkan PSAK 50 (2006). Dalam PSAK 60 juga dinyatakan bahwa entitas harus mengungkapkan mengenai kebijakan akuntansi, akuntansi lindung nilai dan nilai wajar termasuk tingkat dalam hirarki nilai wajar. PSAK 60 juga menambah persyaratan pengungkapan informasi berupa pengungkapan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Julia Halim (2005) yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan berpengaruh signifikan negatif dengan manajemen laba, sejalan dengan perspektif *Opportunistic Earnings Management* (Halim, 2005). Diharapkan dengan pengungkapan yang lebih rinci dapat membatasi manajer dalam melakukan manajemen laba dikarenakan transparansi laporan keuangan semakin meningkat, dan berkurangnya asimetri informasi sehingga dapat menghasilkan perbedaan kualitas laba.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji dampak penerapan *International Accounting Standards* (IAS) maupun *International Financial Reporting Standards* (IFRS) terhadap kualitas laba. Ismail dkk (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “*Earnings Quality and the Adoption of IFRS-Based Accounting Standards Evidence from an Emerging Market*” membandingkan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IFRS di perusahaan Malaysia dengan

tolok ukur manajemen laba dan relevansi nilai. Tingkat manajemen laba diukur dengan menggunakan model Jones (1991), yang diperbarui oleh Dechow dkk (1995), sedangkan tingkat relevansi nilai diukur dengan menggunakan model Ohlson (1995). Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas laba meningkat setelah adopsi IFRS dan relevansi nilai juga meningkat.

Zeghal dkk (2011) dalam penelitiannya berjudul “*An Analysis of the Effect of Mandatory Adoption of IAS/IFRS on Earnings Management*” menguji apakah tingkat manajemen laba menurun setelah adopsi IAS/IFRS. Penelitian ini juga menguji dampak dari 6 hal lain yang diduga berkaitan dengan manajemen laba di perusahaan Perancis seperti independensi dan keefesienan dewan direksi, pemisahan tugas CEO dan ketua dewan, keberadaan komite audit independen, keberadaan pemegang saham, kualitas audit eksternal, dan daftar saham di pasar modal asing. Hasil penelitian membuktikan bahwa adopsi IAS/IFRS telah menurunkan tingkat manajemen laba yang diukur dengan tingkat *discretionary accruals* menggunakan model Kothari dkk (2005). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chua dkk (2012) dan Bangun (2014) yang membuktikan bahwa tingkat manajemen laba menurun setelah adopsi IFRS.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Jeanjean dan Stolowy (2008) dengan judul “*Do Accounting Standards Matter? An Exploratory Analysis of Earnings Management Before and After IFRS Adoption*” yang dilakukan di negara Australia, Perancis, dan Inggris. Ketiga negara tersebut merupakan tiga negara pertama yang mengadopsi IFRS. Hasil penelitian membuktikan bahwa setelah adopsi IFRS tingkat manajemen laba tidak menurun,

bahkan meningkat di Perancis. Hasil yang berbeda dari ketiga negara ini diduga karena Perancis adalah negara dengan *code-law country* sedangkan Australia dan Inggris adalah negara dengan *common-law country*. Perhatian terhadap pasar modal tinggi dinegara Australia dan Inggris, berbeda dengan negara Perancis.

Penelitian kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS/IFRS khususnya di bidang perbankan juga pernah dilakukan di Indonesia oleh Handoyo (2011) dengan menggunakan model Beaver dan Engel (1996), Saputra (2013) dengan menggunakan tiga tolok ukur kualitas laba yaitu model Penman (2001), Leuz dkk (2003) serta Beaver dan Engel (1996), serta Pratama (2014) dengan menggunakan model Beaver dan Engel (1996). Ketiga penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas laba yang signifikan antara sebelum dan sesudah adopsi IFRS.

2.9 Pengembangan Hipotesis

Laba dalam laporan keuangan sebagai sarana informasi bagi para pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui tentang kinerja suatu perusahaan. Laba yang berkualitas adalah laba akuntansi yang mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen yang lebih mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memungkinkan terjadinya praktik manajemen laba dengan adanya berbagai metode dan kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi manajemen laba yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap standar akuntansi. Oleh sebab itu, dalam rangka

meningkatkan kualitas laba dalam laporan keuangan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) melakukan adopsi standar akuntansi internasional.

Adopsi IAS 32 (2009) menjadi PSAK 50 (2010), IAS 39 (2009) menjadi PSAK 55 (2011), dan IFRS 7 (2009) menjadi PSAK 60 (2010) memberikan perbedaan aturan dalam hal penyajian, pengakuan dan pengukuran, serta pengungkapan instrumen keuangan antara sebelum dan sesudah adopsi IAS/IFRS.

Adopsi IAS 32 (2009) menjadi PSAK 50 (2010) merupakan penyempurnaan dari PSAK 50 (2006) dengan menambahkan satu ruang lingkup yaitu kontrak untuk imbalan kontijensi dalam kombinasi bisnis, bertambahnya definisi *puttable instrumen* dan klasifikasi instrumen keuangan, reklasifikasi dari liabilitas keuangan ke instrumen ekuitas, serta adanya aturan mengenai kewajiban menyerahkan bagian aset neto secara pro rata saat likuidasi. Hal ini menyebabkan penyajian instrumen keuangan menjadi lebih rinci dan diharapkan mampu mengurangi “celah” manajer melakukan manajemen laba.

Selanjutnya, bertambahnya aturan reklasifikasi yang lebih ketat pada PSAK 55 (Revisi 2011) yang merupakan adopsi IAS 39 (2009) juga diharapkan dapat membatasi manajer melakukan manajemen laba sehingga kualitas laba yang dihasilkan akan berbeda. Setelah mengadopsi IAS 39 (2009), PSAK 55 (2011) memperkenalkan entitas untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang (L&R) dan laba (rugi) yang muncul diakui diakui dalam laporan laba rugi, dan dari kelompok tersedia untuk dijual (AFS) ke

kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang (L&R) dan laba (rugi) yang muncul diakui sebagai ekuitas.

Semakin banyaknya pengungkapan setelah adopsi IFRS 7 dalam PSAK 50 (2010) diantaranya pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi, akuntansi lindung nilai dan nilai wajar termasuk tingkat dalam hirarki nilai wajar. PSAK 60 juga menambah persyaratan pengungkapan informasi berupa pengungkapan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Julia Halim (2005) yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan berpengaruh signifikan negatif dengan manajemen laba, sejalan dengan perspektif *Opotunistic Earnings Management* (Halim, 2005). Diharapkan dengan pengungkapan yang lebih rinci dapat membatasi manajer dalam melakukan manajemen laba dikarenakan transparansi laporan keuangan semakin meningkat, dan berkurangnya asimetri informasi sehingga dapat menghasilkan perbedaan kualitas laba.

Didukung oleh penelitian terdahulu (Ismail, *et al.*, 2010, Zeghal, *et al.*, 2011, Chua, *et al.*, 2012, dan Bangun, 2014), menyatakan bahwa adopsi IAS/IFRS dapat mengurangi manajemen laba pada perusahaan yang ada di Malaysia, Perancis, Australia dan Indonesia. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Jeanjean dan Stolowy (2008) menunjukkan hasil berbeda yaitu manajemen laba meningkat paska adopsi IFRS pada perusahaan di Perancis. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Handoyo (2011), Saputra (2013), dan Yogka (2014) yang meneliti tentang dampak adopsi IAS/IFRS terhadap kualitas laba yang diukur dengan manajemen laba membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan manajemen laba antara sebelum dan sesudah adopsi IAS/IFRS di

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu, yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha : Terdapat perbedaan kualitas laba yang signifikan antara sebelum dan sesudah adopsi PSAK instrumen keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2014.

